

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

“Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah lembaga yang ditunjuk secara resmi dari pemerintah Indonesia yang memfasilitasi segala kegiatan jual beli saham perusahaan *go public*, maupun surat-surat berharga lainnya” (Idris, 2023). Sebagai lembaga resmi, BEI harus memiliki tanggung jawab dalam memberikan keamanan dan kepercayaan di pasar modal, baik bagi emiten maupun investor. Untuk itu, BEI menerapkan mekanisme pengawasan rutin terhadap aktivitas bursa, serta memastikan bahwa anggota bursa telah melaksanakan kewajibannya dalam melindungi kepentingan investor (Bursa Efek Indonesia).

Menurut Sadono (2024), “selaras dengan tujuan meningkatkan perlindungan investor, serta mewujudkan perdagangan yang teratur, wajar, dan efisien, Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan implementasi papan pemantauan khusus.” Berdasarkan *website* (idx.co.id), “papan pemantauan khusus merupakan perlindungan bagi para investor agar terhindar dari berbagai kemungkinan kerugian yang disebabkan kondisi tertentu pada saham yang diperdagangkan di pasar modal.” Berikut kriteria perusahaan yang tercatat pada papan pemantauan khusus berdasarkan *website* (idx.co.id):

- 1) “Harga rata-rata saham di pasar reguler dan/atau pasar reguler *periodic call auction* kurang dari Rp51,00; dan dalam kondisi likuiditas rendah dengan rata-rata harian nilai kurang dari Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dan volume kurang dari 10.000 (sepuluh ribu) selama 3 bulan terakhir.”
- 2) “Laporan keuangan *auditan* terakhir mendapatkan opini tidak menyatakan pendapat (*disclaimer*).”
- 3) “Tidak membukukan pendapatan atau tidak terdapat perubahan pendapatan pada laporan keuangan *auditan* dan/atau laporan keuangan interim terakhir dibandingkan dengan laporan keuangan yang disampaikan sebelumnya.”

- 4) “Perusahaan tercatat yang merupakan perusahaan tambang minerba atau induk dari perusahaan tambang minerba yang belum memperoleh pendapatan dari *core business* hingga tahun buku ke-4 (keempat) sejak tercatat di bursa.”
- 5) “Memiliki ekuitas negatif pada laporan keuangan terakhir.”
- 6) “Tidak memenuhi persyaratan untuk dapat tetap tercatat di bursa sebagaimana diatur Peraturan Nomor I-A dan I-V (terkait saham *free float*), kecuali ketentuan jumlah saham *free float* paling sedikit 50.000.000 (lima puluh juta) untuk papan utama dan papan pengembangan, dan diatas 5% (lima persen) dari jumlah saham tercatat untuk papan utama, papan pengembangan dan papan akselerasi.”
- 7) “Memiliki likuiditas rendah dengan kriteria nilai transaksi rata-rata harian saham kurang dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan volume transaksi rata-rata harian saham kurang dari 10.000 (sepuluh ribu) saham selama 3 (tiga) bulan terakhir di pasar reguler dan/atau pasar reguler *periodic call auction*.”
- 8) “Perusahaan tercatat dalam kondisi:”
 - a. “dimohonkan PKPU”
 - b. “pailit, atau”
 - c. “pembatalan perdamaian.”
- 9) “Anak perusahaan yang kontribusi pendapatannya material terhadap perusahaan tercatat, dalam kondisi dimohonkan PKPU, pailit, atau pembatalan perdamaian.”
- 10) “Dikenakan penghentian sementara perdagangan efek selama lebih dari 1 (satu) hari bursa yang disebabkan oleh aktivitas perdagangan.”
- 11) “Kondisi lain yang ditetapkan oleh bursa setelah memperoleh persetujuan atau perintah Otoritas Jasa Keuangan.”

Berikut perusahaan yang terdaftar pada papan pemantauan khusus selama tahun 2021-2024:

Tabel 1.1 Jumlah Perusahaan pada Papan Pemantauan Khusus

Sektor	2021	2022	2023	2024	Total
<i>Basic Materials</i>	1	7	11	26	45
<i>Consumer Cyclical</i>	2	9	23	48	82
<i>Consumer Non-Cyclicals</i>	0	4	10	22	36
<i>Energy</i>	0	5	7	19	31
<i>Financials</i>	3	6	6	12	27
<i>Healthcare</i>	0	0	1	6	7
<i>Industrials</i>	0	4	6	19	29
<i>Infrastructures</i>	1	3	7	13	24
<i>Properties & Real Estate</i>	0	9	14	27	50
<i>Technology</i>	1	1	3	8	13
<i>Transportation & Logistic</i>	2	4	3	6	15

Sumber: Bursa Efek Indonesia (2025)

Berdasarkan Tabel 1.1, pada tahun 2021 sektor *financials* menjadi sektor yang paling banyak masuk dalam papan pemantauan khusus dengan mencatatkan 3 perusahaan, alasannya karena perusahaan yang tercatat mengalami penghentian sementara perdagangan efek. Suspensi tersebut terjadi akibat adanya peningkatan harga kumulatif yang signifikan pada harga saham (Alfi, 2021). Namun, di tahun 2021 sektor *consumer cyclicals* juga menunjukkan angka dengan selisih yang tidak jauh berbeda dengan sektor *financial*, yakni mencatatkan 2 perusahaan. Alasannya karena adanya penghentian sementara perdagangan efek selama lebih dari 1 (satu) hari bursa, yang disebabkan oleh peningkatan harga yang kumulatif (idx.co.id).

Selanjutnya pada tahun 2022, sektor *consumer cyclicals* dan *property and real estate* menjadi yang terbanyak masuk dalam papan pemantauan khusus. Alasan rata-rata perusahaan sektor *consumer cyclicals* dan sektor *property and real estate* mendominasi papan pemantauan khusus karena mengalami likuiditas rendah atas saham perusahaan (idx.co.id). Kemudian, selama tahun 2023 hingga 2024, jumlah perusahaan pada papan pemantauan khusus didominasi oleh sektor *consumer cyclicals*, dengan peningkatan signifikan pada tahun 2024.

Menurut Putranyo (2023), “faktor yang membuat saham di sektor *consumer cyclicals* dominan mengisi daftar tersebut untuk tahun 2023 yakni dari sisi fundamental, performa bisnis dan keuangan sebagian emiten barang konsumen *non-primer* di daftar tersebut sedang dalam kondisi negatif, terutama dari sisi pendapatan, profitabilitas, dan ekuitas. Kemudian karena adanya permasalahan perkara hukum atau PKPU. Terakhir, karena emitennya *small-mid caps*, atau secara bisnis dan *market share* bukan *leader*, sehingga kinerjanya rentan tertekan fluktuasi ekonomi.” Sejalan dengan pernyataan tersebut, Usman (2025) menyatakan bahwa, “produk impor murah dari China turut menekan performa ritel domestik, terutama yang bergerak di segmen *fashion* dan elektronik. Selain itu, pelemahan rupiah menyebabkan peningkatan biaya bahan baku impor, yang mempersempit *margin* keuntungan perusahaan. Kondisi ini semakin diperparah oleh perubahan pola konsumsi masyarakat yang lebih mengutamakan kebutuhan pokok, dibandingkan barang konsumsi *non primer*.” Selanjutnya, alasan untuk tahun 2024 menurut *website* (idx.co.id), karena banyaknya perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan untuk tetap tercatat di BEI, terutama terkait ketentuan minimum saham minoritas yang kurang dari batas yang ditetapkan.

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa sektor *consumer cyclicals* secara konsisten masuk dalam pencatatan papan pemantauan khusus selama tahun 2021-2024. Selain itu, dalam 4 tahun terakhir, 3 tahun diantaranya jumlah sektor *consumer cyclicals* selalu menjadi yang tertinggi dibandingkan sektor lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, sektor *consumer cyclicals* merupakan sektor dengan jumlah paling banyak tercatat dalam papan pemantauan khusus dan merupakan sektor yang mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dengan sektor lainnya.

Banyaknya sektor *consumer cyclicals* yang masuk dalam papan pemantauan khusus mengindikasikan bahwa BEI meragukan kelangsungan usaha sektor tersebut. Perusahaan yang masuk dalam papan pemantauan khusus, rata-rata merupakan perusahaan yang sedang mengalami permasalahan terkait kinerja operasionalnya, seperti adanya tekanan finansial, penurunan profitabilitas, atau

volatilitas dalam permintaan pasar. Kondisi tersebut dapat menimbulkan kekhawatiran BEI terhadap stabilitas perusahaan terkait kelangsungan usaha yang mungkin dapat merugikan investor, sehingga BEI memutuskan untuk mencatat perusahaan tersebut dalam papan pemantauan khusus sebagai langkah untuk melindungi investor dari potensi kerugian.

Kondisi yang dialami oleh sektor *consumer cyclicals* tidak terlepas dari karakteristiknya sendiri. Menurut Ramadhani (2022), “sektor *consumer cyclical* merupakan perusahaan yang memproduksi barang *non* pokok, atau kebutuhan sekunder dan tersier. Masyarakat dapat menghentikan pengeluaran untuk sektor ini ketika masa sulit. Ketika masyarakat menunda atau berhenti membeli sesuatu, pendapatan perusahaan yang memproduksi dan menjual produk tersebut akan menurun. Kondisi inilah yang memberi tekanan pada perusahaan dan saham sektor *consumer cyclicals*.”

Berdasarkan penjelasan tersebut, kondisi yang dialami oleh perusahaan sektor *consumer cyclicals* di papan pemantauan khusus menunjukkan indikasi kesulitan keuangan dan operasional. Kondisi tersebut mencerminkan faktor-faktor yang dijelaskan dalam Standar *Audit* (SA) 570 terkait kondisi keraguan kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam SA 570, “peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya yakni ketidakmampuan untuk melunasi kreditur pada saat jatuh tempo, ketidakmampuan untuk memperoleh pendanaan, perkara hukum yang dihadapi entitas, arus kas operasi yang negatif, rasio keuangan utama yang buruk, kerugian operasi yang substansial, kehilangan pelanggan utama, dan faktor lainnya.”

Hal tersebut sejalan dengan penjelasan mengenai penyebab perusahaan sektor *consumer cyclicals* tercatat dalam pemantauan khusus, yaitu adanya masalah terkait dengan penundaan kewajiban pembayaran utang yang menunjukkan ketidakmampuan perusahaan untuk melunasi kreditur pada saat jatuh tempo. Selain

itu, adanya kondisi negatif terkait pendapatan, profitabilitas, dan ekuitas yang mengindikasikan adanya kerugian yang substansial atau kondisi rasio keuangan utama perusahaan yang buruk. Kemudian, karena sifatnya yang *non* pokok, dapat membuat sektor tersebut mengalami kerugian yang substansial pada saat kondisi ekonomi tidak stabil. Dengan demikian, berdasarkan penjelasan tersebut maka tergambar bahwa kondisi pada perusahaan *consumer cyclicals* sejalan dengan gejala atau indikasi keraguan kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya yang dapat menyebabkan pemberian opini *audit going concern*.

Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam SA 570, “*auditor* bertanggung jawab untuk memperoleh bukti *audit* yang cukup dan tepat mengenai ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan, dan untuk menyimpulkan apakah terdapat suatu ketidakpastian material tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya telah teridentifikasi, *auditor* harus memperoleh bukti *audit* yang cukup dan tepat untuk menentukan apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya (selanjutnya disebut sebagai “ketidakpastian material”).”

“Dalam hal ini, *auditor* harus melakukan evaluasi atas rencana manajemen untuk tindakan di masa depan yang berkaitan dengan penilaian kelangsungan usaha entitas, apakah hasil rencana tersebut kemungkinan memperbaiki situasi, dan apakah rencana manajemen layak dilaksanakan sesuai dengan kondisinya. Pengevaluasian atas rencana manajemen terkait tindakan di masa depan dapat mencakup meminta keterangan kepada manajemen tentang rencana manajemen untuk tindakan di masa depan, termasuk, sebagai contoh, rencana untuk melikuidasi aset, meminjam dana atau merestrukturisasi utang, mengurangi atau menunda pembelanjaan, atau meningkatkan permodalan. Jika *auditor* menilai bahwa rencana

tersebut telah efektif dan tepat, *auditor* dapat memberikan opini *audit going concern*” IAPI dalam SA 570.

Opini *audit going concern* memiliki peran penting sebagai peringatan awal yang menunjukkan adanya masalah terkait kinerja perusahaan, hal ini mendorong manajemen untuk menyusun rencana yang terukur dan realistis agar keberhasilannya dapat dipastikan tercapai dan bermanfaat untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Kemudian, pemberian opini *audit going concern* berguna sebagai salah satu dasar dalam pengambilan keputusan manajemen untuk mempertimbangkan kembali model bisnis dan strategi operasionalnya. Hal ini mendorong manajemen untuk menyusun kebijakan restrukturisasi, efisiensi biaya, atau mencari sumber pendanaan alternatif agar perusahaan dapat bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Dengan adanya opini *audit going concern*, harapannya perusahaan bukan hanya mampu melewati masalah keuangan yang dihadapinya, tetapi juga memiliki peluang untuk terus berkembang. Melalui strategi yang tepat dan perencanaan yang terukur, perusahaan dapat menjadi lebih inovatif dan kompetitif. Dengan demikian, perusahaan bukan hanya sekadar mampu bertahan, tetapi melalui peningkatan kinerja operasional dapat menciptakan kinerja yang optimal untuk tahun-tahun selanjutnya.

Salah satu perusahaan yang memperoleh opini *audit going concern* adalah PT Bukit Uluwatu Villa Tbk (BUVA), yaitu perusahaan sektor *consumer cyclicals* yang bergerak di bidang perhotelan. Berdasarkan laporan *auditor* independen, pada 31 Desember 2021 perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp361 miliar dan defisit sebesar Rp1 triliun. Atas hal tersebut, *auditor* menilai bahwa kondisi tersebut mengindikasikan adanya suatu ketidakpastian yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Berdasarkan catatan atas laporan keuangan perusahaan, hal ini disebabkan oleh Pandemi COVID-19 yang mempengaruhi rendahnya tingkat hunian hotel yang berada di Bali dan Jakarta, serta adanya kompetisi harga yang agresif.

Berdasarkan laporan tahunan perusahaan, untuk mengatasi tantangan ini, rencana yang ditempuh oleh manajemen meliputi memantau biaya secara ketat, fokus dengan program penghematan energi, evaluasi dan riset untuk menarik pasar baru, mengajukan permohonan restrukturisasi kepada bank, memberlakukan pengurangan gaji, menjual aset perusahaan yang sudah tidak digunakan, serta mencari investor untuk penanaman modal. Langkah-langkah ini dinilai efektif oleh *auditor*, sehingga pada tahun 2021 BUVA mendapatkan opini *audit going concern*. Namun, pada tahun 2022 perusahaan kurang berhasil meningkatkan kinerjanya yang tercermin dengan perolehan akumulasi kerugian menjadi sebesar Rp1,38 triliun yang disebabkan oleh hunian yang masih rendah, karena hanya mengandalkan wisatawan lokal atau wisatawan asing yang berjumlah sedikit, imbas ketentuan beberapa negara yang masih memberlakukan pembatasan perjalanan.

Atas kondisi tersebut, *auditor* menilai bahwa kondisi ini mengindikasikan adanya suatu ketidakpastian yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Berdasarkan catatan atas laporan keuangan perusahaan, rencana baru yang diberikan oleh perusahaan untuk mengatasi masalah tersebut meliputi mengajukan permohonan restrukturisasi kepada semua bank dan bukan bank kreditur, menyeleksi biaya pengeluaran modal berdasarkan kondisi prioritas lapangan, mengelola *cash flow* secara sangat ketat, melakukan pembayaran hanya untuk kebutuhan mendesak dan menjaga efisien biaya karyawan baik di hotel maupun kantor pusat. *Auditor* menilai rencana tersebut efektif sehingga memperpanjang pemberian opini *audit going concern*-nya untuk tahun 2022.

Kinerja keuangan perusahaan masih kurang stabil di tahun 2023, yakni Grup mengalami saldo defisit sebesar Rp1,35 triliun dan liabilitas jangka pendek Grup melebihi aset jangka pendek sebesar Rp41 miliar. Selain itu, BEI mengumumkan penghentian sementara perdagangan efek BUVA pada 14 April 2023. Hal tersebut karena BEI menilai adanya ketidakpastian atas kelangsungan usaha Perseroan serta sehubungan dengan tidak dipenuhinya kewajiban PT Bukit Uluwatu Villa Tbk.

Dengan demikian dapat disimpulkan, pada tahun 2021 BUVA memperoleh opini *audit going concern* karena mengalami kerugian. Namun, di tahun selanjutnya yakni 2022 perusahaan gagal memperbaiki kinerja perusahaan karena rencana yang disusun tidak terealisasi secara maksimal akibat faktor eksternal, seperti masih adanya pembatasan perjalanan yang membatasi jumlah wisatawan yang mengakibatkan akumulasi kerugian Rp1,38 triliun dan berdampak pada perpanjangan pemberian opini *audit going concern*. Perusahaan terus mencatatkan kerugian yang signifikan, dengan defisit mencapai Rp1,35 triliun pada 2023. Karena ketidakpastian atas kelangsungan usahanya dan ketidakmampuannya memenuhi kewajiban, BEI akhirnya memberlakukan suspensi perdagangan efek BUVA.

Contoh selanjutnya yaitu PT Pudjiadi and Sons Tbk (PNSE), perusahaan sektor perhotelan dan restoran. Berdasarkan laporan *auditor* independen, entitas mengalami masalah keuangan pada tahun 2021. Perusahaan mencatat rugi usaha sebesar Rp6 miliar, rugi komprehensif Rp28,44 miliar, serta defisit arus kas operasional Rp11,36 miliar. Atas hal tersebut, *auditor* menyatakan terdapat keraguan substansial tentang kemampuan Grup untuk melanjutkan kelangsungan usahanya. Hal ini disebabkan karena adanya Pandemi COVID-19 yang berdampak signifikan pada bisnis, selanjutnya karena persaingan dari *platform* reservasi *online*, serta kenaikan biaya operasional yang menekan profitabilitas.

Berdasarkan laporan tahunan perusahaan, untuk mengatasi tantangan ini, manajemen menerapkan strategi digitalisasi sistem reservasi, optimasi pemanfaatan aset, serta kebijakan efisiensi seperti pembatasan kredit kepada agen dan penjadwalan ulang pembayaran vendor. Langkah-langkah ini dinilai efektif oleh *auditor*, sehingga pada tahun 2021 PNSE mendapatkan opini *audit going concern*. Pada tahun 2022, perusahaan berhasil meningkatkan laba bruto sebesar 185,17% menjadi Rp81,77 miliar serta membalikkan rugi usaha menjadi laba usaha Rp31,3 miliar.

Hal tersebut disebabkan oleh terlaksananya rencana manajemen perusahaan yakni optimasi pemanfaatan aset dengan dibukanya seluruh kamar yang dimiliki terutama The Jayakarta Bali, serta keberhasilan perseroan dalam melakukan penghematan pada beban pokok dan gaji tunjangan operasional yang turun 53%. Lebih lanjut, perusahaan berhasil memperoleh arus kas operasi sebesar Rp8 miliar setelah sebelumnya memperoleh arus kas operasi yang negatif sebesar Rp11 miliar yang disebabkan oleh meningkatnya penerimaan dari pelanggan. Kemudian terkait dengan pengelolaan risiko likuiditas, perusahaan menilai kas dan bank yang dimiliki mampu untuk membiayai operasional grup. Tidak hanya itu, pada tahun 2022 perusahaan juga memperoleh opini *audit* wajar tanpa pengecualian. Tren positif berlanjut pada 2023 dengan pendapatan meningkat 54,4% menjadi Rp221,62 miliar, serta laba komprehensif mencapai Rp25,15 miliar.

Dari kasus PT Pudjiadi and Sons Tbk (PNSE), dapat disimpulkan bahwa di tahun 2021 PNSE memperoleh opini *audit going concern* karena mengalami kerugian dan defisit arus kas. Namun, manajemen berhasil membuat dan merealisasikan perencanaan yang efektif seperti optimasi aset dan efisiensi biaya. Sehingga, pada tahun berikutnya yaitu tahun 2022 perusahaan menerima opini wajar tanpa pengecualian dan mencatatkan peningkatan laba yang menggambarkan adanya perbaikan kinerja perusahaan.

Berdasarkan kasus perusahaan BUVA dan PNSE maka terlihat pentingnya opini *audit going concern* bagi perusahaan. Ketika perusahaan memperoleh opini *audit going concern* maka perusahaan berkesempatan untuk memperbaiki kinerja perusahaan dengan menerapkan rencana yang diberikan. Apabila rencana tersebut dapat terealisasi, maka kondisi keuangan perusahaan akan mengalami peningkatan. Namun, jika setelah diberi opini *audit going concern* perusahaan gagal untuk merealisasikan rencananya, baik karena faktor *internal* dan eksternal, maka kondisi ini akan menyebabkan kerugian yang berkelanjutan. Sehingga penting bagi perusahaan untuk memanfaatkan pemberian opini *audit going concern* dari *auditor*. Oleh karena itu faktor yang mempengaruhi opini *audit going concern* adalah hal yang penting untuk diteliti.

Pada penelitian ini terdapat 4 faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi pemberian opini *audit going concern*, yaitu *leverage*, komite *audit*, ukuran perusahaan, dan opini *audit* tahun sebelumnya. “*Leverage* adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya” (Nagari & Suhartini, 2022). *Leverage* dalam penelitian ini diproksikan dengan menggunakan *debt to equity ratio*. “*Debt to equity ratio* adalah rasio yang membandingkan jumlah utang dengan modal yang dimiliki perusahaan” (Andriana et al., 2023). Semakin besar nilai *debt to equity ratio* maka sebagian besar sumber pendanaan perusahaan berasal dari utang. Penggunaan utang yang tinggi dapat meningkatkan risiko perusahaan, sebab utang memiliki biaya tetap yang harus dibayar sesuai dengan kesepakatan, terlepas dari kondisi keuangan perusahaan. Di sisi lain, kondisi bisnis penuh ketidakpastian, seperti adanya fluktuasi pasar dan perubahan regulasi yang dapat mempengaruhi stabilitas perusahaan dan kemampuan dalam menghasilkan pendapatan. Ketidakpastian ini terutama dapat berdampak pada sektor *consumer cyclicals*, yang cenderung rentan terhadap perubahan ekonomi. Meski demikian, perusahaan harus tetap memenuhi kewajibannya kepada kreditur, sehingga menyebabkan beban finansial yang dapat meningkatkan risiko gagal bayar.

Jika perusahaan gagal untuk melunasi utang sesuai dengan waktu yang ditentukan, maka perusahaan akan kesulitan untuk memperoleh pinjaman kembali karena hilangnya kepercayaan dari kreditur. Tanpa adanya pendanaan, maka perusahaan akan sulit untuk melakukan kegiatan bisnis seperti melakukan *research and development*, inovasi bisnis, serta pengadaan persediaan. Kurangnya inovasi akibat keterbatasan dana dapat berpengaruh pada penurunan daya saing perusahaan, terutama untuk produk di sektor *consumer cyclicals*, salah satunya produk pakaian yang mudah mengalami perubahan gaya. Jika perusahaan gagal berinovasi, daya tarik produk akan berkurang, dan menyebabkan terjadinya penurunan penjualan. Jika penjualan perusahaan menurun hal ini akan berakibat pada pendapatan perusahaan yang ikut menurun dan perusahaan akhirnya mengalami kerugian.

Sesuai dengan SA 570, beberapa faktor yang mengindikasikan adanya masalah *going concern* adalah ketidakmampuan untuk melunasi utang kepada

kreditur pada tanggal jatuh tempo dan kerugian operasi yang substansial. Berdasarkan hal ini, *auditor* akan meminta pihak manajemen menyusun rencana untuk mengatasi masalah tersebut. Contoh rencananya meliputi, restrukturisasi utang, menjual aset perusahaan yang sudah tidak terpakai, menyewakan tanah dan bangunan, serta mencari *strategic partner* untuk menyuntik dana perusahaan. Jika *auditor* menilai bahwa rencana manajemen dapat dilakukan secara efektif, maka *auditor* akan memberikan opini *audit going concern*. Sehingga dapat dinyatakan bahwa semakin tinggi *leverage*, maka semakin besar kemungkinan perusahaan menerima opini *audit going concern*. Hal ini didukung oleh penelitian Simanjuntak et al. (2020) yang berpendapat bahwa *Debt to Equity Ratio* berpengaruh positif terhadap opini *audit going concern*. Namun berbeda dengan penelitian Cahyono et al. (2023) yang berpendapat bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap opini *audit going concern*.

Selain *leverage*, faktor kedua yang diperkirakan mempengaruhi opini *audit going concern* adalah komite *audit*. Berdasarkan POJK atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK/.04/2015, “komite *audit* adalah komite yang dibentuk di dalam perusahaan dengan tanggung jawab terhadap Dewan Komisaris dalam rangka membantu pelaksanaan fungsi dan tugas Dewan Komisaris.” Komite *audit* diukur menggunakan perbandingan antara jumlah anggota komite *audit* dengan dewan komisaris. Semakin rendah rasio tersebut menunjukkan bahwa proporsi komite *audit* lebih sedikit dibandingkan dewan komisaris. Rendahnya proporsi anggota komite *audit* dapat menyebabkan keterbatasan sumber daya dan kapasitas komite *audit* dalam menjalankan tugas, seperti menelaah informasi keuangan, menelaah ketaatan terhadap peraturan, serta menelaah terkait proses akuntansi. Keterbatasan tersebut dapat meningkatkan risiko terjadinya *fraud*, terutama dalam penerapan kebijakan akuntansi. Sebagai contoh, perusahaan menerapkan kebijakan pengakuan pendapatan yang tidak sesuai, seperti mengakui pendapatan sebelum memenuhi kriteria pengakuan yang seharusnya. Tanpa pengawasan yang memadai, kebijakan yang tidak tepat dapat diterapkan dan meningkatkan risiko keuangan serta menyesatkan pemangku kepentingan.

Sesuai dengan SA 570, salah satu indikasi adanya masalah *going concern* adalah ketidakpatuhan terhadap ketentuan permodalan atau ketentuan statutori atau regulatori lainnya. Berdasarkan hal tersebut, *auditor* akan meminta pihak manajemen membuat rencana untuk mengatasi masalah yang terjadi. Contoh rencana tersebut seperti melakukan evaluasi terhadap kebijakan akuntansi yang diterapkan guna memastikan kepatuhan terhadap standar yang berlaku, serta melibatkan *auditor internal* dan eksternal dalam proses pengawasan yang lebih ketat. Jika *auditor* menilai bahwa rencana manajemen dapat diterapkan secara efektif untuk mengatasi permasalahan yang ada, maka *auditor* kemungkinan akan memberikan opini *audit going concern*.

Sehingga dapat dinyatakan bahwa semakin rendah proporsi komite *audit*, maka akan semakin tinggi kemungkinan perusahaan untuk menerima opini *audit going concern*. Hal ini didukung oleh penelitian Aditya N. et al. (2023) yang menyatakan bahwa komite *audit* berpengaruh negatif terhadap opini *audit going concern*. Namun berbeda dengan penelitian Khasanah & Napisah (2024) yang berpendapat bahwa komite *audit* tidak berpengaruh terhadap opini *audit going concern*.

Selain komite *audit*, terdapat faktor ketiga yang diperkirakan mempengaruhi opini *audit going concern*, yaitu ukuran perusahaan. “Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya perusahaan yang dapat ditunjukkan dengan total aktiva, jadi ukuran perusahaan yaitu besarnya total aset yang dimiliki perusahaan secara umum” (Melania et al., 2019) dalam (Haalisa & Inayati, 2021). Dari pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa perusahaan yang kecil umumnya memiliki aset yang terbatas. Aset yang terbatas berdampak pada keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, yang pada akhirnya berpengaruh pada jumlah produk yang dapat dihasilkan oleh perusahaan. Dengan kapasitas produksi yang rendah, kemampuan perusahaan dalam memenuhi permintaan pasar menjadi terbatas sehingga dapat menghambat pertumbuhan bisnis dan meningkatkan risiko keuangan.

Untuk dapat meningkatkan produksi, perusahaan tentu perlu memiliki aset tambahan seperti mesin, namun hal ini sering terhambat oleh keterbatasan dana. Akibatnya, perusahaan gagal memenuhi permintaan pelanggan dan berisiko menurunkan kepuasan pelanggan serta daya saing perusahaan. Jika kondisi ini terus berlanjut, pelanggan akan beralih pada kompetitor yang akhirnya berdampak pada hilangnya pelanggan. Hilangnya pelanggan dapat menyebabkan perolehan pendapatan perusahaan menurun. Jika pendapatan perusahaan terus menurun maka perusahaan akan memperoleh kerugian. Sesuai dengan SA 570, indikasi adanya masalah *going concern* adalah kerugian operasi yang substantial atau penurunan signifikan dalam nilai aset yang digunakan untuk menghasilkan arus kas, kekurangan penyediaan barang atau bahan, serta hilangnya suatu pasar utama dan pelanggan utama.

Berdasarkan hal tersebut, *auditor* akan meminta pihak manajemen membuat rencana untuk mengatasi masalah tersebut. Contoh rencana yang dapat ditempuh seperti mencari *strategic partner*, meminjam dana untuk membeli aset perusahaan atau melakukan *leasing*. Jika *auditor* menilai bahwa rencana manajemen dapat dilakukan secara efektif, maka *auditor* akan memberikan opini *audit going concern*. Sehingga dapat dinyatakan bahwa semakin kecil ukuran perusahaan, maka akan semakin tinggi kemungkinan perusahaan untuk menerima opini *audit going concern*. Hal ini didukung oleh penelitian Napitupulu & Latrini (2022) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap opini *audit going concern*. Namun berbeda dengan penelitian Halim (2021) yang berpendapat bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap opini *audit going concern*.

Faktor terakhir yang diduga mempengaruhi pemberian opini *audit going concern* adalah opini *audit* tahun sebelumnya. “Opini *audit* tahun sebelumnya didefinisikan sebagai opini *audit* yang diterima pada tahun sebelumnya” (Melistiari et al., 2021). Opini *audit* tahun sebelumnya diukur dengan menggunakan variabel *dummy*, perusahaan yang satu tahun sebelumnya memperoleh opini *audit going concern* akan diberikan kode 1 dan perusahaan yang satu tahun sebelumnya tidak memperoleh opini *audit going concern* akan diberikan kode 0. Perusahaan yang

tahun sebelumnya memperoleh opini *audit going concern* berarti perusahaan tersebut sedang mengalami kesulitan keuangan dan adanya ketidakpastian dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, namun perusahaan memiliki rencana atau solusi yang efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Meskipun demikian, memperoleh keberhasilan rencana manajemen bukanlah hal yang mudah, karena ketercapaiannya dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah waktu. Adanya keterbatasan waktu menyebabkan perusahaan tidak dapat memperoleh seluruh hasil dari strateginya dalam tahun yang sama. Sebagian hasilnya berpotensi terlihat pada tahun-tahun berikutnya. Sebagai contoh, manajemen memberikan rencana untuk menciptakan produk yang berbeda dari produk sebelumnya, guna membuka jalur distribusi baru sebagai solusi atas kejenuhan pasar terhadap bisnis lama yang terus mengalami kerugian. Dalam pengembangannya, tentu perusahaan perlu menentukan segmentasi pasar yang tepat seperti melakukan *survey*, analisis tren konsumen dan lain sebagainya guna memperoleh pasar yang tepat. Oleh karena itu, umumnya perusahaan memerlukan analisis yang menyeluruh, sehingga cenderung membutuhkan waktu yang lama. Akibatnya, ketercapaian strategi menjadi lebih panjang, dan hasil dari strategi tersebut baru dapat diperoleh dalam jangka waktu yang lebih lama. Kondisi ini dapat meningkatkan tekanan terhadap keuangan perusahaan, karena dana yang dialokasikan untuk aktivitas tersebut belum menghasilkan keuntungan atau pemasukan, sementara perusahaan tetap harus menanggung biaya pengembangan produk.

Hal ini dapat menyebabkan arus kas operasi perusahaan semakin negatif, sehingga ketidakpastian terhadap kelangsungan usaha perusahaan akan semakin meningkat. Sesuai dengan SA 570 (2021) salah satu indikasi *going concern* adalah arus kas operasi negatif dan kerugian operasi yang substansial. Jika *auditor* menilai rencana manajemen masih belum bisa memperbaiki kinerja perusahaan, *auditor* akan meminta manajemen memberikan rencana lain untuk mengatasi persoalan tersebut. Rencana yang dapat diterapkan adalah dengan terlebih dahulu fokus pada rencana jangka pendek agar ketercapaiannya dapat segera terealisasi, seperti

melakukan efisiensi biaya, restrukturisasi utang, dan menyewakan tanah dan bangunan. Setelah itu, perusahaan dapat fokus untuk melanjutkan proses *creation* tersebut, karena hasil dari strategi ini umumnya baru dapat terlihat pada periode berikutnya. Jika *auditor* menilai bahwa rencana manajemen dapat dilaksanakan dengan efektif, maka *auditor* akan memberikan opini *audit going concern* kembali atau memperpanjang masa opini *audit going concern*-nya.

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa adanya opini *audit going concern* pada tahun sebelumnya meningkatkan kemungkinan perusahaan untuk menerima opini *audit going concern* pada tahun berikutnya. Hal ini didukung oleh penelitian Napitupulu & Latrini (2022) yang menyatakan bahwa opini *audit* tahun sebelumnya berpengaruh positif terhadap opini *audit going concern*. Namun berbeda dengan penelitian Iswari & Darmita (2020) yang berpendapat bahwa opini *audit* tahun sebelumnya tidak berpengaruh terhadap opini *audit going concern*.

Penelitian ini merupakan replikasi atas penelitian yang dilakukan oleh Napitupulu & Latrini (2022). Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini, adalah:

1. Variabel Independen

Penelitian ini menambahkan 2 (dua) variabel independen yaitu *leverage* berdasarkan penelitian Simanjuntak et al. (2020) dan komite *audit* berdasarkan penelitian Khasanah & Napisah (2024). Penelitian ini tidak menggunakan kembali variabel *Financial distress* karena tidak berpengaruh terhadap opini *audit going concern*, dan tidak menggunakan kembali variabel Reputasi KAP karena pengukuran yang digunakan yaitu perbandingan antara KAP *Big Four* dan *non-Big Four*, sementara keduanya menerapkan standar *audit* yang sama dalam pemberian opini.

2. Objek Penelitian

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah sektor *consumer cyclicals*, sedangkan objek yang digunakan pada penelitian sebelumnya adalah sektor *property* dan *real estate*.

3. Periode Penelitian

Penelitian ini menggunakan periode tahun 2021-2023, sedangkan periode yang digunakan pada penelitian sebelumnya adalah 2015- 2018.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka judul untuk penelitian ini adalah **“PENGARUH *LEVERAGE*, KOMITE *AUDIT*, UKURAN PERUSAHAAN, DAN OPINI *AUDIT* TAHUN SEBELUMNYA TERHADAP OPINI *AUDIT GOING CONCERN* (Studi Empiris pada Perusahaan *Consumer Cyclical*s yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2021-2023).”**

1.2 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah opini *audit going concern* menggunakan variabel *dummy*. *Dummy* 1 untuk perusahaan yang menerima opini *audit going concern* dan *dummy* 0 untuk perusahaan yang tidak menerima opini *audit going concern*.
2. Variabel independen dalam penelitian ini adalah *Leverage* diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio (DER)* diukur dengan cara total utang dibagi dengan total ekuitas, Komite *Audit* diukur dengan cara jumlah anggota komite *audit* dibagi dengan jumlah dewan komisaris, Ukuran Perusahaan diproksikan dengan menggunakan *log natural total asset (LnTA)*, dan Opini *Audit* Tahun Sebelumnya menggunakan variabel *dummy*. *Dummy* 1 untuk perusahaan yang tahun sebelumnya memperoleh opini *audit going concern* dan *dummy* 0 untuk perusahaan yang tahun sebelumnya tidak memperoleh opini *audit going concern*.
3. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan *Consumer Cyclical*s yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
4. Periode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah tahun 2021-2023.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *leverage* yang diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio (DER)* berpengaruh positif terhadap opini *audit going concern*?
2. Apakah komite *audit* berpengaruh negatif terhadap opini *audit going concern*?
3. Apakah ukuran perusahaan yang diproksikan dengan *log natural total asset (LnTA)* berpengaruh negatif terhadap opini *audit going concern*?
4. Apakah opini *audit* tahun sebelumnya berpengaruh positif terhadap opini *audit going concern*?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh positif *leverage* yang diproksikan *Debt to Equity Ratio (DER)* terhadap opini *audit going concern*.
2. Pengaruh negatif komite *audit* terhadap opini *audit going concern*.
3. Pengaruh negatif ukuran perusahaan yang diproksikan dengan *log natural total asset (LnTA)* terhadap opini *audit going concern*.
4. Pengaruh positif opini *audit* tahun sebelumnya terhadap opini *audit going concern*.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Auditor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan *auditor* dalam menilai potensi kelangsungan usaha suatu perusahaan (*going concern*) agar *auditor* tidak salah dalam memberikan opini.

2. Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada perusahaan atau entitas mengenai faktor apa saja yang dapat berpengaruh dalam penerimaan opini *audit going concern* serta dapat menjadi *early warning* untuk segera menjalankan rencana manajemen yang telah disusun untuk dapat mengatasi kemungkinan kebangkrutan.

3. Investor dan Calon Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan informasi mengenai kelangsungan hidup perusahaan (*going concern*) dan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi berdasarkan informasi yang tertera pada laporan keuangan.

4. Kreditur

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi kreditur dan sebagai bahan acuan dalam mengambil keputusan untuk memberikan pinjaman atau kebijakan kredit kepada perusahaan.

5. Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi dan bahan acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya dengan topik pembahasan yang berkaitan dengan opini *audit going concern*.

6. Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan untuk menambah wawasan mengenai pengaruh *leverage*, komite *audit*, ukuran perusahaan dan opini *audit* tahun sebelumnya terhadap opini *audit going concern*.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang pengambilan topik mengenai opini *audit going concern*, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi uraian teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, *literature* dari penelitian terdahulu yang menjadikan kerangka pemikiran dan hipotesis sebagai landasan untuk penelitian ini serta memuat tentang penjelasan, pembahasan secara rinci yang terkait dengan teori opini *audit going concern* dan variabel independen yang digunakan, yaitu *leverage*, komite *audit*, ukuran perusahaan dan opini *audit* tahun sebelumnya, dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi gambaran umum objek penelitian, metode penelitian, pengukuran variabel penelitian, metode pengumpulan data, metode pengumpulan sampel dan metode analisis data dan berbagai macam uji yang diterapkan pada penelitian ini.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari objek penelitian, deskripsi penelitian berdasarkan data yang dikumpulkan, pengujian dan analisis hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan simpulan penelitian atas data hasil penelitian, keterbatasan penelitian, saran peneliti, dan implikasi untuk penelitian selanjutnya. Simpulan berisi jawaban atas tujuan penelitian serta informasi tambahan yang diperoleh dari hasil penelitian. Keterbatasan berisi kelemahan yang terdapat dalam penelitian ini sedangkan saran berisi usulan untuk mengatasi masalah atau kelemahan tersebut, yang dapat dilakukan pada penelitian selanjutnya.